



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ADI RAHMAT**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **854370**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.044.941.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 77 m²/36 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 105.151.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m²/110 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 547.190.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m²/45 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 156.386.000
4. Tanah Seluas 720 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 59.576.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m²/80 m² di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 168.025.000
6. Tanah Seluas 323 m² di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 8.613.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 585.150.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.950.000
3. MOBIL, HYUNDAI CRETA N LINE TOP 4X2 AT Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 432.500.000



4. MOTOR, YAMAHA BXY AT - GEAR ULTIMA HYBRID S Tahun
2025, HASIL SENDIRI Rp. 21.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	399.017.153
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.059.108.153
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.059.108.153

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.